

Evaluation of E-Government in Public Services in the Village Government of Tanjungpandan District, Belitung Regency

Daniel^{1*}, Zul Rachmat³

¹Program Magister Sistem Informasi Manajemen, ISB Atmaluhur, ²Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Amika Soppeng

E-mail: 2399600034@mahasiswa.atmaluhur.ac.id^{1*}, zulrachmat@amiklps.ac.id²

ARTICLE INFO

Riwayat Artikel

Received: 08/08/2025

Revised: 08/22/2025

Accepted: 01/09/2025

Keywords: Evaluation, Government, Village Government

Kata Kunci: Evaluasi, Government, Pemerintahan Desa

ABSTRACT

E-Government development in Belitung Regency has been running for 12 years from 2011 to 2023. E-Government development for the Belitung Regency Government needs to be implemented down to the village government because village government is the spearhead of public services in the government system. The objectives of this research are: 1) to describe the development of e-Government in village government in Tanjungpandan District, and 2) to describe the implementation of E-Government in public services on the village government website in Tanjungpandan District. The research results show that there are 33.33% of village websites that are quite complete in presenting general and government information. The development of e-Government in village government in Tanjungpandan District as a whole is in the preparation stage. Therefore, the implementation of E-Government in public services in village government in Tanjungpandan District has not been implemented well.

ABSTRAK

Pengembangan E-Government di Kabupaten Belitung sudah berjalan 12 tahun dari tahun 2011 hingga tahun 2023. Pengembangan *E-Government* Pemerintah Kabupaten Belitung perlu dilaksanakan hingga ke pemerintahan desa karena pemerintahan desa adalah ujung tombak pelayanan publik dalam sistem pemerintahan. Tujuan penelitian ini adalah: 1) mendeskripsikan pengembangan *E-Government* pada pemerintahan desa di Kecamatan Tanjungpandan, dan 2) mendeskripsikan implementasi *E-Government* dalam layanan publik pada website pemerintahan desa di Kecamatan Tanjungpandan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada 33.33% website desa yang cukup lengkap dalam menyajikan informasi umum dan pemerintahan. Pengembangan *E-Government* pada pemerintahan desa di Kecamatan Tanjungpandan secara keseluruhan berada pada tahap persiapan. Oleh sebab itu, implementasi *E-Government* dalam pelayanan publik pada pemerintahan desa di Kecamatan Tanjungpandan belum

terlaksana dengan baik.

PENDAHULUAN

Elektronik Government (E-Government) adalah penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik yang bertujuan meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif dan efisien berbasis teknologi informasi. E-Government telah lama dicanangkan di Indonesia, yaitu sejak dikeluarkan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government. Namun pelaksanaan di beberapa daerah masih belum optimal.

Di Kabupaten Belitung, E-Government diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengembangan E-Government di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung. Pengembangan E-Government di Kabupaten Belitung sudah berjalan 12 tahun dari tahun 2011 hingga tahun 2023. Penggunaan internet dan intranet di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Belitung akan ditingkatkan secara bertahap dan diarahkan untuk mengurangi penggunaan surat menyurat secara hardcopy. Salah satu fungsi E-Government adalah mewujudkan pelayanan administrasi yang cepat, transparansi, dan akuntabel. Maksud dari pendayagunaan website di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung adalah untuk mengatur penyelenggaraan website sehingga dapat berdayaguna dan berhasilguna untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Pengembangan E-Government Pemerintah Kabupaten Belitung tentunya juga perlu diikuti dengan pengembangan E-Government pemerintahan desa karena pemerintahan desa adalah ujung tombak pelayanan publik dalam sistem pemerintahan. Berdasarkan Permendagri Nomor 2 Tahun 2017, Administrasi Pemerintahan Desa adalah keseluruhan proses kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai Pemerintahan Desa pada Buku Register Desa. Lebih lanjut, standar pelayanan minimum yang harus disediakan oleh pemerintah desa adalah: 1) penyediaan dan penyebaran informasi pelayanan, 2) penyediaan data dan informasi kependudukan dan pertanahan, 3) pemberian surat keterangan, 4)

penyederhanaan pelayanan, dan 5) pengaduan masyarakat.

Dalam mendukung layanan administrasi pemerintahan desa, maka E-Government menjadi kebutuhan pada era teknologi saat ini. Berdasarkan hasil pelacakan website pemerintah desa di wilayah Kecamatan Tanjungpandan yang merupakan daerah perkotaan, ada sembilan desa/kelurahan yang sudah memiliki website sedangkan tujuh desa/kelurahan di wilayah Kecamatan Tanjungpandan belum memiliki website. Hal ini menunjukkan bahwa masih banyak pemerintah desa yang belum menerapkan E-Government. Padahal, penerapan E-Government menjadi salah satu indikator penilaian yang cukup tinggi pada ajang perlombaan desa atau kelurahan.

Salah satu desa di Kecamatan Tanjungpandan yang memiliki website adalah Desa Aik Pelempang Jaya. Semestinya, pemerintahan desa telah menerapkan E-Government namun kenyataannya belum nampak aktivitas yang mendukung pelayanan secara online. Sebagai pelaksana administrasi di desa, masih ada keluhan dari perangkat desa tentang pengelolaan administrasi yang belum terintegrasi sehingga sering mengalami hambatan-hambatan dalam pelaksanaan tugasnya. Selain itu, ada keluhan masyarakat tentang kurang efisiennya pelayanan administrasi di desa padahal sudah pada era teknologi yang dimana akses pelayanan seharusnya lebih cepat.

Beberapa penelitian tentang studi E-Government misalnya evaluasi website Kabupaten Situbondo (Nangameka, 2022) yang pernah mendapatkan tiga penghargaan Top Digital Award 2021 dari Majalah ITWorks, bahwa total lima pilar (informasi, komunikasi, transaksi, integrasi, dan partisipasi) sebagai indikator berada di angka 62% terpenuhi dari keseluruhan unsur-unsur pendukung pilar. Pilar yang perlu mendapatkan perhatian untuk pengembangan website adalah transaksi karena nilainya hanya 33,33%. Hasil penelitian lainnya yaitu evaluasi penerapan E-Government dengan menggunakan lima aspek dimensi yaitu kelembagaan, kebijakan, infrastruktur, aplikasi, dan perencanaan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Riau. Berdasarkan hasil penelitian pada lima

dimensi tersebut, dimensi perencanaan berada pada katagori kurang (Wahyuni dan Angraini, 2015). Hasil penelitian tersebut memberikan rekomendasi perbaikan dan pengembangan untuk implementasi E-Government yang lebih baik.

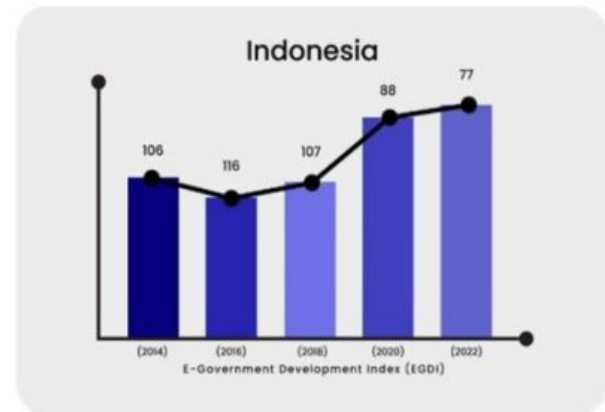
Kebaruan penelitian ini adalah kedalaman informasi yang akan digali dalam setiap tahapan E-Government dengan menggunakan model evaluasi CIPP (Context, Input, Process, dan Product) oleh Daniel L. Stufflebeam. Penelusuran yang dilakukan pada jurnal-jurnal online, belum ditemukan adanya penggunaan model CIPP pada evaluasi pelaksanaan E-Government. Pemilihan model CIPP didasarkan pada pengembangan E-Government yang memiliki empat tingkatan yaitu persiapan, pematangan, pementapan, dan pemanfaatan (Setiawan, 2023). Selain itu, pengembangan E-Government memiliki regulasi yang kuat untuk kelancaran pelaksanaan pengembangan E-Government. Artinya, E-Government dapat dikatakan sebagai sebuah program pemerintah yang tersusun dari komponen konteks, input, proses, dan hasil.

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian E-Government dalam Peraturan Bupati Belitung Nomor 23 Tahun 2011 adalah penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis (menggunakan) elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif dan efisien dengan menerapkan teknologi informasi. Pada tahun 2020 terjadi kemajuan dalam pengembangan E-Government Indonesia. Berdasarkan data Indonesia.go.id (2021), bahwa E-Government Indonesia mengalami kenaikan peringkat dari 107 pada tahun 2018 menjadi 89 pada tahun 2020 dari 193 negara pada survei E-Government Development Index (EGDI) yang dilakukan oleh Departemen Ekonomi dan Hubungan Sosial (DESA) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Meski demikian, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (menpan.go.id, 2020) menyebutkan bahwa masih perlu memaksimalkan penerapan SPBE di Indonesia dalam aspek tata kelola, layanan, dan sumber manusia yang nilainya masih hanya sedikit di atas rata-rata.

Hasil survei E-Government tahun 2022 yang dirilis oleh PBB kembali menunjukkan hasil yang menggembirakan yaitu Indonesia berada pada

peringkat 77. Peringkat ini mengalami kenaikan yang semula pada tahun 2020 berada pada peringkat 88. Hal ini menunjukkan bahwa adanya peningkatan pengembangan dan pelaksanaan SPBE. Berikut ini gambaran grafik perkembangan E-Government Indonesia berdasarkan hasil survei PBB.



Gambar 1. Grafik Perkembangan E-Government Indonesia

Sumber: <https://aptika.kominfo.go.id/>

Peningkatan pengembangan E-Government di Indonesia harus menjadi motivasi untuk mengembangkan lebih lanjut aspek-aspek E-Government pada setiap jenjang pemerintah. Nangameka, T.I (2022) menyebutkan dari hasil evaluasi website Kabupaten Situbondo yang pernah mendapatkan tiga penghargaan Top Digital Award 2021 dari Majalah ITWorks, bahwa total lima pilar (informasi, komunikasi, transaksi, integrasi, dan partisipasi) sebagai indikator berada di angka 62% terpenuhi dari keseluruhan unsur-unsur pendukung pilar. Pilar yang perlu mendapatkan perhatian untuk pengembangan website adalah transaksi karena nilainya hanya 33,33%.

Wahyuni, F., dan Angraini (2015) melakukan evaluasi penerapan E-Government dengan menggunakan lima aspek dimensi yaitu kelembagaan, kebijakan, infrastruktur, aplikasi, dan perencanaan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Riau. Berdasarkan hasil penelitian pada lima dimensi tersebut, dimensi perencanaan berada pada katagori kurang. Hasil penelitian tersebut memberikan rekomendasi perbaikan dan pengembangan untuk implementasi E-Government yang lebih baik.

Berdasarkan hasil penelitian yang dipaparkan, masih perlu adanya evaluasi

pengembangan E-Government khususnya di Kabupaten Belitung. Tahap E-Government menurut Inpres No.3 Tahun 2003 tentang kebijakan dan strategi nasional pengembangan (Setiawan, W., 2017), ada 4 (empat) tingkatan yaitu:

1. Persiapan

Pada tingkat persiapan, dilakukan pembuatan situs web sebagai media informasi dan komunikasi. Sosialisasi situs web dilakukan untuk internal dan publik.

2. Pematangan

Pembuatan situs web informasi publik yang bersifat interaktif. Pembuatan situs web informasi publik yang bersifat interaktif.

3. Pemantapan

Pembuatan situs web yang bersifat transaksi pelayanan publik. Pembuatan interoperabilitas aplikasi dan data dengan lembaga lain.

4. Pemanfaatan

Pembuatan aplikasi untuk pelayanan yang bersifat Government to Government (G2G), Government to Business (G2B), Government to Consumers (G2C).

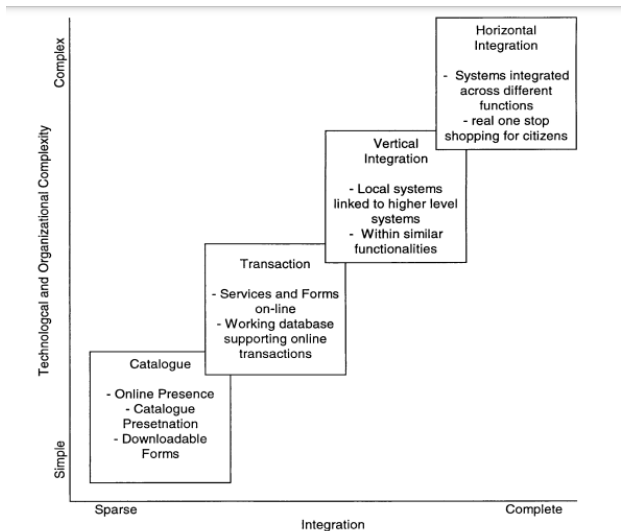
Irawan, B. dan Hidayat, M.N. (2021) memaparkan beberapa model evaluasi E-Government yaitu model Layne & Lee (2001), model Hiller & Bellanger (2001), model United Nations (2008), model World Bank, dan Model Fietkieicz, Mainka, & Stock (2017). Diantara model-model tersebut, Model Fietkieicz, Mainka, & Stock (2017) lebih lengkap karena merupakan hasil pengembangan dari model-model yang lain. Ada dugaan sedikit "bias" karena model ini diterapkan pada E-Government di kota-kota besar negara maju sehingga kurang tepat digunakan untuk di daerah kecil. Dalam penelitian ini, model yang akan digunakan adalah model umum yang sering digunakan oleh evaluator yaitu model Layne & Lee yaitu: 1) catalogue; 2) transaction; 3) vertical integration; dan 4) horizontal integration.

Pada tingkat pertama, catalogue, penggunaan ICT difokuskan pada memastikan keberadaan pemerintah secara online (focused on establishing an online presence for the government). Pada tahapan ini yang dilakukan pemerintah adalah menyediakan informasi publik secara online biasanya melalui website dan oleh sebab itu maka aktivitas tersebut terlihat seperti pembuatan "katalog". Naik ke tingkat berikutnya, transaction, dimana pada tahap ini

penggunaan ICT telah memungkinkan adanya transaksi antara pemerintah dan masyarakat melalui kanal-kanal elektronik. Transaksi ini bisa berupa pembayaran denda, tagihan, atau lainnya, mekanisme pembaharuan identitas dan lain sebagainya. Intinya ada pada interaksi yang melibatkan transaksi (dalam bentuk informasi, uang dan lainnya) antara pemerintah dan masyarakat. Tahapan selanjutnya adalah vertical integration, yang lebih kompleks daripada tingkat sebelumnya. Pada tahapan ini, integrasi secara vertical merupakan suatu kebutuhan untuk mensinkronisasikan transaksi yang terjadi. Contohnya adalah pengurusan izin usaha misalnya. Transaksi (informasi) yang dilakukan pada tingkat pemerintah kota mendorong adanya integrasi vertikal antar agensi yang sama pada tingkat provinsi dan nasional agar tercipta kesamaan data. Jadi pengurusan izin hanya dilakukan satu kali pada tingkat pemerintah kota yang datanya akan dimiliki pula oleh pemerintah provinsi dan nasional.

Yang terakhir adalah horizontal integration, tingkat yang paling kompleks dalam model Layne & Lee ini mengintegrasikan mekanisme koordinasi antar agensi. Contohnya adalah pendataan penduduk yang dilakukan oleh Dinas Pencatatan Sipil di tingkat kelurahan, dengan asumsi sudah diterapkannya vertical integration maka data yang sama akan dimiliki oleh pemerintah tingkat kota, provinsi dan nasional. Data yang dimiliki oleh Dinas Pencatatan Sipil ini akan bisa terintegrasi dengan agensi lain, misalnya Komisi Pemilihan Umum atau Badan Pusat Statistik, sehingga tidak ada lagi tumpang tindih data dan beragam versi data dalam skema horizontal integration.

Berikut ini gambar model evaluasi pengembangan E-Government



Gambar 2. Model Tahapan E-Government Layne & Lee

Salah satu fungsi E-Government adalah mewujudkan pelayanan administrasi yang cepat, transparansi, dan akuntabel. Maksud dari pendayagunaan website di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung adalah untuk mengatur penyelenggaraan website sehingga dapat berdayaguna dan berhasilguna untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Berdasarkan Permendagri Nomor 2 Tahun 2017, Administrasi Pemerintahan Desa adalah keseluruhan proses kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai Pemerintahan Desa pada Buku Register Desa. Lebih lanjut, standar pelayanan minimum yang harus disediakan oleh pemerintah desa adalah: 1) penyediaan dan penyebaran informasi pelayanan, 2) penyediaan data dan informasi kependudukan dan pertanahan, 3) pemberian surat keterangan, 4) penyederhanaan pelayanan, dan 5) pengaduan masyarakat.

METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif deskriptif adalah suatu metode yang dalam bentuk pendeskripsian menggunakan fakta untuk mendukung data-data secara lengkap dan mendalam. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumen dengan cara menelusuri website pemerintahan desa. Indikator yang digunakan untuk mendapatkan informasi tentang implementasi E-

Government dalam layanan publik pemerintahan desa mengacu pada model Gartner (Irawan, B. dan Hidayat, M.N.,2021) yaitu: 1) presence; 2) interaction; 3) transaction; dan 4) transformation.

Data yang dihasilkan dianalisis dengan teknik kualitatif deskriptif. Ada tiga tahap dalam analisis ini yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data adalah proses pemilihan data dengan cara meringkas. Setelah data terseleksi, kemudian dilakukan penyajian data. Penyajian data adalah menyusun data dalam bentuk teks naratif sehingga data mudah untuk dilihat dan ditarik kesimpulan. Penarikan kesimpulan dilakukan secara terus menerus selama berada di lapangan. Setelah data disajikan maka akan lebih mudah dalam menarik kesimpulan yang lebih kuat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Website adalah salah satu produk E-Government sebagai media untuk meningkatkan minat dan kesempatan masyarakat dalam menyediakan pelayanan publik dan umpan balik dari masyarakat (Satria, 2006). Jadi, kualitas website yang digunakan oleh pemerintah daerah bisa menjadi indikator pencapaian keberhasilan E-Government karena website menyediakan berbagai informasi dan layanan untuk bisa diakses oleh masyarakat dengan efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Melalui website, masyarakat tidak hanya sebagai pengguna layanan namun juga bisa menjadi bagian dari pengawasan pelaksanaan pemerintahan daerah.

Berdasarkan data dari Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Belitung, ada 8 (delapan) desa/kelurahan yang memiliki website dengan domain desa.id. berdasarkan telusuran dari google, ada penambahan satu kelurahan yang memiliki website dengan domain belitung.go.id. Jadi, ada 9 dari 16 atau sebanyak 56,25% desa/kelurahan di Kecamatan Tanjungpandan yang memiliki website. Adapun hasil analisis studi website dapat dijabarkan sebagai berikut.

1. Presence

Daftar informasi yang disajikan pada website adalah: Profil Desa, Pemerintahan, Informasi, Potensi Desa, Produk Hukum. Dilihat sajian dari informasi, maka ada 3 website yang dapat dikategorikan cukup lengkap, yaitu Desa

Perawas, Desa Air Saga, dan Desa Buluh Tumbang.

2. Interaction

Ada 1 desa yang menyajikan menu aduan masyarakat yaitu Desa Air Merbau, namun menu ini tidak berfungsi. Seluruh website menyediakan media interaksi berupa email dan nomor telepon yang bisa. Ada satu website yang menyediakan media interaksi lebih lengkap yaitu link media sosial berupa facebook, instagram, twiter, dan youtube. Ada 1 desa yang menyediakan dokumen-dokumen yang bisa di download oleh pengguna

3. Transaction

Belum ada satupun website desa yang memiliki menu transaksi layanan publik secara online seperti pembayaran pajak, administrasi kependudukan, dan lain-lain

4. Transformation

Ada 3 website yang menyajikan tautan dengan pihak terkait yaitu:

- a. Desa Pelempang Jaya: portal satu data indonesia, portal belitung satu data, BPS Kabupaten Belitung
- b. Desa Perawas: Portal kementerian desa, PDT, dan Transmigrasi, portal Kabupaten Belitung, JDIH Kabupaten Belitung, website Kemendagri, dan Badan Pertanahan Nasional
- c. Desa Air Saga: Desa Wisata Air Saga, Suak Parak Mangrove. Tautan hanya untuk mengakses informasi ke website pihak terkait, belum mencapai pada sistem integrasi yang dapat digunakan untuk transaksi layanan publik..

Berkaitan dengan layanan publik, Yunita dan Aprianto (2018) menjelaskan bahwa fungsi pelayanan mencakup kependudukan, perpajakan dan retribusi, pendaftaran dan perijinan, bisnis dan investasi, pengaduan masyarakat, dan publikasi info umum dan pemerintahan. Berdasarkan hasil penelitian, ada dua bentuk pelayanan publik yang ditemukan yaitu pelayanan pengaduan masyarakat dan pelayanan publikasi info umum dan pemerintahan. Pelayanan pengaduan masyarakat hanya ditemukan pada satu website desa namun tidak bisa diakses. Semua website desa menyediakan media interaksi berupa email dan nomor telepon yang bisa digunakan untuk

pelayanan pengaduan masyarakat. Ada satu website yang menyediakan media interaksi lebih lengkap yaitu link media sosial berupa facebook, instagram, twiter, dan youtube. Belum ada aplikasi khusus sebagai wujud tahap pematangan perkembangan website dalam implementasi E-Government .

Publikasi info umum dan pemerintahan dapat dilihat dari informasi yang tersedia dalam website desa. Berdasarkan hasil penelitian, ada 3 website atau 33,33% website yang dapat dikategorikan cukup lengkap dalam menyajikan informasi umum dan pemerintahan yaitu Desa Perawas, Desa Air Saga, dan Desa Buluh Tumbang. Kelengkapan tersebut dilihat dari ada atau tidaknya data dalam setiap menu yang disajikan dalam website. Ketiga website yang dikategorikan cukup lengkap tersebut juga telah menyajikan informasi atau berita terkini pada bulan Mei 2023. Dari ketiga website tersebut, ada dua website yang menyajikan informasi Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDesa). Meskipun ketiga website tersebut dikategorikan cukup lengkap, ada beberapa informasi umum yang belum disajikan dalam menu website, misalnya data desa berupa data wilayah administrasi dan data kependudukan.

Ada empat tahapan pengembangan e-Government menurut instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 yaitu tahap persiapan, pematangan, pemantapan, dan pemanfaatan. Berdasarkan data penelitian, pengembangan e-Government pada pemerintahan desa di Kecamatan Tanjungpandan secara keseluruhan berada pada tahap persiapan. Jadi, implementasi e-Government dalam pelayanan publik pada pemerintahan desa di Kecamatan Tanjungpandan belum berjalan sesuai harapan. Implementasi e-Government dalam pelayanan publik dapat terwujud ketika informasi dasar yang disediakan dalam website sudah lengkap semua sehingga masyarakat bisa mendapatkan informasi tentang pemerintahan desa secara lengkap dan akurat. Kemudian, interaksi antara pengguna atau masyarakat dengan pemerintah desa dapat terjalin secara efektif dan efisien dengan adanya aplikasi yang disediakan untuk pengaduan masyarakat. Adanya transaksi online melalui website desa menjadi bagian yang paling penting untuk menunjukkan implementasi e-Government dalam pelayanan publik. Masyarakat tidak harus datang langsung ke kantor desa untuk mengantri layanan kependudukan,

perpajakan dan retribusi, pendaftaran dan perijinan, bisnis dan investasi. e-Government dalam pelayanan publik kan lebih sempurna ketika website desa mampu menyediakan layanan yang terintegrasi dengan pihak-pihak terkait.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa ada 33.33% website desa yang cukup lengkap dalam menyajikan informasi umum dan pemerintahan. Pengembangan e-Government pada pemerintahan desa di Kecamatan Tanjungpandan secara keseluruhan berada pada tahap persiapan. Oleh sebab itu, implementasi e-Government dalam pelayanan publik pada pemerintahan desa di Kecamatan Tanjungpandan belum terlaksana dengan baik.

Saran yang dapat disampaikan dari hasil penelitian ini adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung melalui Kominfo Kabupaten Belitung sebaiknya melakukan pendampingan pengelolaan website secara intensif kepada pemerintahan desa. Selain itu, pemerintahan desa sebaiknya memiliki komitmen yang kuat dalam pengelolaan website desa dan mengimplementasikannya dalam pelayanan publik. Untuk meningkatkan motivasi desa dalam mengelola website maka pemerintah daerah perlu mengadakan kompetisi e-Government atau memberikan apresiasi kepada pemerintahan desa yang mengimplementasikan e-Government dengan baik.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kami ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam proses penelitian ini. Saya ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada dosen pembimbing yang telah memberikan arahan, masukan, dan bimbingan yang sangat berharga. Bimbingan Anda telah membantu kami dalam memahami berbagai aspek penting dalam pengembangan sistem informasi dan mendorong kami untuk terus belajar dan berkembang. Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggara, S. (2016). Ilmu Administrasi Negara. Bandung: Pustaka Setia. DOI : <http://dx.doi.org/10.11113/jt.v79.9987>
- Irawan, B., & Hidayat, M.N. (2021). E-Government : Konsep, Esensi dan Studi Kasus. Samarinda: Mulawarman University Press..
- Indiahono, D., & Tobirin. 2021. Kebijakan dan Pelayanan Publik Berbasis Keadilan Sosial di Era Disrupsi dan Big Data. Jawa Tengah: SIP Publishing
- Ikhbaluddin. (2021). Pelayanan Publik Berbasis Online di Desa (Studi pada Empat Desa di Kecamatan Jatinangor) Jurnal Teknologi dan Komunikasi Pemerintahan, 3 (2), 16-30.. DOI: <https://doi.org/10.33701/jtkp.v3i2.2309>
- Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government
- Muhammad. (2019). Pengantar Ilmu Administrasi Negara. Sulawesi: Unimal Press
- Nangameka, T.I. (2022). Evaluating E-Government Maturity Using the Pillar Approach: A Focus on Situbondo Regency Government Official Website, Indonesia. TRANSFORMASI: Jurnal Manajemen Pemerintahan, 14 (1), 39-56. DOI: <https://doi.org/10.33701/jtp.v14i1.2520>
- Novriando, A., dan Purnomo. E.P. (2020). Penetrasi Digital untuk Pembangunan Berkelanjutan: Keberhasilan Pelayanan E-Government Kota Yogyakarta. Jurnal Ilmiah Muqoddimah, 4 (2), 97-108. DOI:10.31604/jim.v4i2.2020.97-108Medioni,
- Srinivasan, S., Latchman, H., Shea, J., Wong, T., & McNair, J. Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengembangan E-Government di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung.
- Roldán, J. J., Joossen, G., Sanz, D., del Cerro, J., and Permendagri Nomor 2 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Desa.
- Samuel, C.A. (2020). Capaian, Peluang, dan Tantangan Implementasi E-Government di Indonesia. <https://cfd.sisipol.ugm.ac.id/wp-content/uploads/sites/1423/2021/01/15-CfDS-Case-Study-Capaian-Peluang-dan-Tantangan-Implementasi-e-Government-di-Indonesia.pdf>
- Wahyuni, F., dan Angraini, A. (2015). Evaluasi Penerapan E-Government Pada Dinas

Komunikasi Dan Informatika Provinsi Riau
Menggunakan Pendekatan Metode Peg.
Jurnal Ilmiah Rekayasa dan Manajemen
Sistem Informasi, 1(1), 39–43. DOI:
<http://dx.doi.org/10.24014/rmsi.v1i1.1303>